



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

FEBRUARI 2023

LAPORAN BULANAN

KEPANITERAAN & KESEKRETARIATAN



📍 Jl. Syech Nawawi Al-bantani No.3 Km. 5, Kota Serang, Banten 42123

☎ (0254) 214085

✉ serang@ptun.org

🌐 <https://ptun-serang.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah s.w.t. Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin, rahmat dan karunia-Nya. Laporan Bulanan untuk periode Bulan Februari Tahun 2023 telah dapat disusun, sebagai pertanggungjawaban atas kinerja dan untuk mengevaluasi kegiatan pelaksanaan tugas dari seluruh unit kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yakni bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Dalam penyusunannya laporan ini tentu banyak kendala dan kekurangan, perubahan yang ada adalah sebagai bentuk perbaikan, untuk itu Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh unit kerja yang telah membantu dan berkoordinasi dalam penyusunan laporan bulanan ini.

Demikian laporan bulanan ini disusun sebagai bahan untuk mengetahui gambaran kinerja dari seluruh unit kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi agar dapat mewujudkan kinerja yang lebih baik serta lebih efektif dan efisien.

Serang, 9 Maret 2023
Wakil Ketua,

NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.
NIP. 19761204 200112 2 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Sistematika Penyusunan Laporan	4

Bab II Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

A. Kepaniteraan	5
1. Struktur Organisasi Kepaniteraan	6
2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepaniteraan	6
a. Kepaniteraan Muda Perkara	6
b. Kepaniteraan Muda Hukum	10
B. Kesekretariatan	13
1. Struktur Organisasi Kesekretariatan	14
2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kesekretariatan	15
1) Sub Bagian Umum dan Keuangan	15
2) Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana ..	26
3) Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	35

Bab III Penutup

Kesimpulan	51
------------------	----

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengungkapan informasi secara terbuka mengenai satuan kerja sangatlah penting bagi badan publik. Hal ini dilakukan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen badan publik kepada *stakeholder*. Keterbukaan informasi dari satu badan publik dapat digunakan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen badan publik kepada *stakeholder*. Keterbukaan informasi dari badan publik dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi *stakeholder* dalam pengambilan kebijakan.

Laporan adalah sebuah produk informasi yang sangat penting karena berkaitan dengan kondisi badan publik, keandalan dari informasi yang terkandung sangatlah dibutuhkan bagi pihak yang mempunyai kepentingan terhadap badan publik. Oleh karenanya badan publik diharapkan lebih transparan dalam mengungkapkan informasi mengenai *corporate governance*, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan oleh Stakeholder karena pengungkapan sebagai salah satu aspek *good governance* diharapkan dapat menjadi dasar untuk melihat baik tidaknya kinerja satu badan publik.

Secara umum seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan peradilan tingkat pertama baik bersifat administratif, keuangan dan organisasi serta teknis peradilan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : IX/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Instruksi Presiden Nomor: 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber

daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada dipercayakan ke publik.

Hadirnya *core values* BerAKHLAK menjadi budaya kerja yang baru untuk setiap ASN di Indonesia. Melayani masyarakat dengan profesional, bertanggung jawab dalam menggunakan sumber daya yang diamanahkan oleh publik, memiliki kompetensi dalam menangani isu dan masalah bangsa, menjadi simbol kesatuan dan persatuan bangsa, loyal terhadap negara Indonesia, mampu beradaptasi dengan segala perubahan dan siap berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia.

Sejatinya sudah ada nilai-nilai dasar ASN sejak lama tetapi nilai-nilai dasar ASN itu bervariasi pada berbagai instansi pemerintah. Kondisi tersebut menjadikan langkah dan kebijakan yang berbeda dalam konsep dan praktik layanan publik kepada masyarakat. Nilai-nilai ASN “Ber-AKHLAK” merupakan semboyan dan fondasi baru bagi ASN di Indonesia yang merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Core values ASN ini sebagai intisari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN.

Peluncuran *core values* ini bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai bagi seluruh ASN di Indonesia sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional dalam melaksanakan tupoksi dan kebijakan di bidang pelayanan administrasi peradilan tata usaha negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengacu kepada Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:

Visi :

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”

Misi :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan;

Berdasarkan visi dan misi diatas, dikembangkanlah nilai-nilai utama Mahkamah Agung. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan dalam upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk budaya badan peradilan. Terdapat 8 nilai utama, antara lain:

1. Kemandirian
2. Integritas
3. Kejujuran
4. Akuntabilitas
5. Responsibilitas
6. Keterbukaan
7. Ketidakberpihakan
8. Perlakuan yang sama di hadapan hukum

Oleh karena itu 8 nilai utama Mahkamah Agung harus tertancap kuat dan diimplementasikan dalam pikiran, ucapan, serta tindakan setiap individu dalam kehidupan berorganisasi dengan pola pikir yang melayani masyarakat, profesionalitas kinerja yang tinggi, dan berorientasi pada hasil.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini adalah penyampaian hasil pelaksanaan tugas pekerjaan dan kegiatan pada lingkup tugas fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang dilakukan selama bulan Februari 2023.

Dengan tersusunnya laporan ini dapatlah kiranya dijadikan sebagai informasi/evaluasi bagi Stakeholder Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam pembinaan dan peningkatan tugas ke depan baik oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia pada masa yang akan datang, serta sebagai sarana pengawasan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan.

C. Sistematika Penyusunan Laporan

Mekanisme penyusunan laporan ini memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Digital Arsip dan Laporan Terintegrasi “SIDAPAT”, yang dikembangkan, berdasarkan aplikasi tersebut data pelaporan yang telah diinput oleh tiap unit kerja Kepaniteraan dan Sub Bagian dijadikan bahan laporan primer kemudian disajikan menjadi laporan secara utuh dalam satu kesatuan.

Adapun sistematika penyajian laporan ini dapat diuraikan antara lain:

Bab I Pendahuluan menguraikan mengenai latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan dan lingkup pekerjaan dan manfaat dokumen laporan bulanan dengan keterkaitannya terhadap laporan.

Bab II Menguraikan Pelaksanaan tugas unit kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada bulan berkenaan beserta dengan kendala yang timbul dari hasil pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang.

Bab III Penutup yang menguraikan kesimpulan.

BAB II

PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT KERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

A. Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

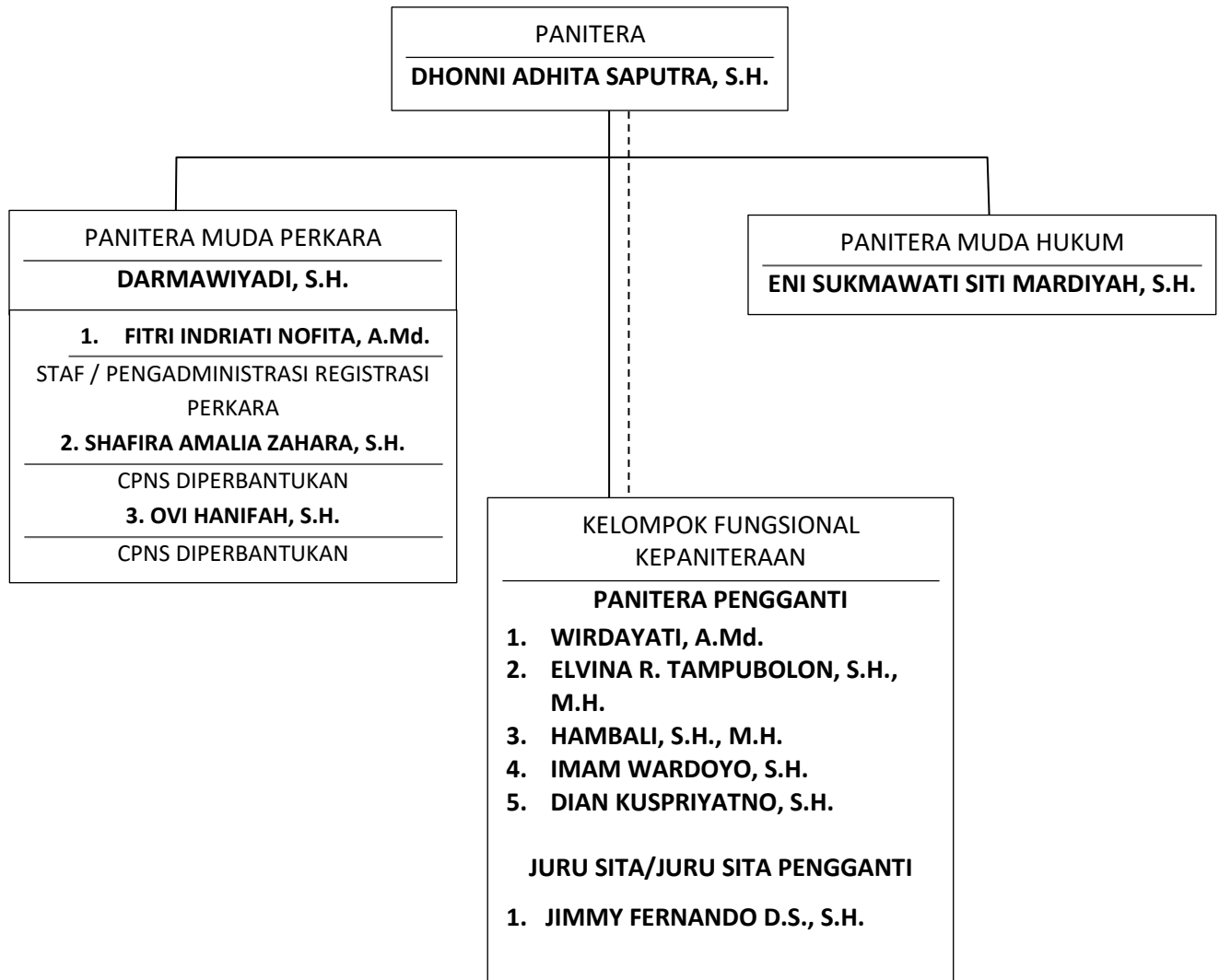
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dipimpin oleh Panitera, mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- 4) Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- 5) Pelaksanaan mediasi;
- 6) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

1. Struktur Organisasi Kepaniteraan

Struktur organisasi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat dilihat pada diagram di bawah ini:



2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepaniteraan

Sebagaimana pada Bab VI tentang Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara, Bagian Ketiga Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Susunan organisasi kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A terdiri atas:

a. Kepaniteraan Muda Perkara;

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang tata usaha negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Panitera Muda Perkara menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan berkas perkara gugatan/sengketa tata usaha negara;
- 2) pelaksanaan registrasi perkara gugatan/sengketa tata usaha negara;
- 3) pelaksanaan penelitian administrasi gugatan/sengketa tata usaha negara;
- 4) pelaksanaan penyerahan berkas perkara gugatan/sengketa tata usaha negara kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Panitera untuk ditetapkan apakah perkara tersebut dismissal atau tidak, jika tidak akan ditetapkan atau ditunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa.
- 5) pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 6) pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak;
- 7) pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 8) pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung;
- 9) pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 10) pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 11) pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 12) pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- 13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan Kepaniteraan Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada bulan Februari 2023 dapat disampaikan sebagai berikut:

a) Keadaan Keuangan Perkara dan Titipan Pihak Ketiga bulan Februari 2023

Uraian	Keadaan Keuangan				Tempat Penyimpanan Uang	
	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Bank	Brankas
1	2	3		4	5	6 (3+4-5)
Biaya Perkara	Rp 30.964.300	Rp 19.922.100	Rp 21.039.100	Rp 29.847.300	Rp 28.838.800	Rp 1.008.500
Biaya Eksekusi	Rp 694.000	Rp 300.000	Rp 129.000	Rp 865.000	Rp -	Rp 865.000
JUMLAH	Rp 31.658.300	Rp 20.222.100	Rp 21.168.100	Rp 30.712.300	Rp 28.838.800	Rp 1.873.500

b) Biaya Perkara/Panjar Biaya Perkara s.d. Bulan Februari 2023

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 (3+4-5)
1	Saldo Awal	Rp 31.658.300			
2	Penerimaan		Rp 20.222.100		
3	Biaya ATK			Rp 1.270.000	
4	Biaya Panggilan			Rp 230.000	
5	Biaya Pemberitahuan			Rp 992.000	
6	Biaya Pemeriksaan Setempat			Rp 10.720.000	
7	Pengiriman Biaya			Rp 250.000	
8	Biaya Pengiriman dan Pemberkasan			Rp 909.000	
9	Meterai			Rp 90.000	
10	PNBP			Rp 3.130.000	
11	Pengambilan Sisa Panjar			Rp 3.577.100	
12	Pengumuman media			Rp -	
13	Biaya lain-lain (Pengadaan informasi)			Rp -	
JUMLAH		Rp 31.658.300	Rp 20.222.100	Rp 21.168.100	Rp 30.712.300

c) Biaya Proses/ATK/Pemberkasan s.d. Bulan Februari 2023

NO	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 (3+4-5)
1	Saldo Awal	Rp 1.072.000			
2	Penerimaan		Rp 1.270.000		
3	Pengeluaran (untuk seluruh pembelian ATK secara riil, tidak perlu rincian satu persatu)			Rp 853.000	
JUMLAH		Rp 1.072.000	Rp 1.270.000	Rp 853.000	Rp 1.489.000

d) Biaya Eksekusi s.d. Bulan Februari 2023

NO	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 (3+4-5)
1	Saldo Awal	Rp 694.000			Rp 694.000
2	Penerimaan		Rp 300.000		
3	Meterai				
4	PNBP			Rp 25.000	
5	Leges				
6	Pemberitahuan di Media Massa				
7	Surat Pemberitahuan Kepada Presiden/DPR				
8	Surat Pemberitahuan Relas				
9	Pengembalian sisa panjar			Rp 104.000	
10	Biaya Lain-lain				
JUMLAH		Rp 694.000	Rp 300.000	Rp 129.000	Rp 865.000

b. Kepaniteraan Muda Hukum.

Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- 2) pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- 3) pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- 4) pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- 5) pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- 6) pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- 7) pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada bulan Februari 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Laporan Keadaan Perkara Bulan Februari 2023

➤ Perkara gugatan biasa (<i>e-Court</i>)	: 19 Perkara
Masuk bulan ini	: 4 Perkara
Perkara tidak lolos <i>dismissal</i>	: - Perkara
Perkara cabut	: - Perkara
Perkara putus	: 5 Perkara
Sisa Perkara belum putus	: 18 Perkara
➤ Perkara Gugatan Permohonan	: - Perkara
Masuk bulan ini	: - Perkara
Putus	: - Perkara
Sisa Perkara belum putus	: - Perkara
➤ Perkara Gugatan KIP	: 1 Perkara
Masuk	: - Perkara
Putus	: - Perkara
Cabut	: - Perkara
Jumlah Perkara belum putus	: 1 Perkara

- Perkara BHT : 4 Perkara
 - 1) Pkr. No. 10/G/2022/PTUN.SRG
 - 2) Pkr. No. 12/G/2022/PTUN.SRG
 - 3) Pkr. No. 6/G/2022/PTUN.SRG
 - 4) Pkr. No. 10/G/2023/PTUN.SRG
- Upaya Hukum Banding : - Perkara
- Upaya Hukum Kasasi : 5 Perkara
 - 1) Pkr. No. 38/G/2022/PTUN.SRG
 - 2) Pkr. No. 46/G/2022/PTUN.SRG
 - 3) Pkr. No. 48/G/2022/PTUN.SRG
 - 4) Pkr. No. 49/G/2022/PTUN.SRG
 - 5) Pkr. No. 40/G/2022/PTUN.SRG
- Upaya Hukum Peninjauan Kembali: 1 Perkara
 - 1) Pkr. No. 62/G/2020/PTUN.SRG
- Perkara Eksekusi : 1 Perkara
 - 1) Pkr. No. 087/IX/KI-BANTEN/PS/2022
- Penyerahan Berkas Perkara BHT ke Panitera Muda Hukum : 5 Berkas Perkara

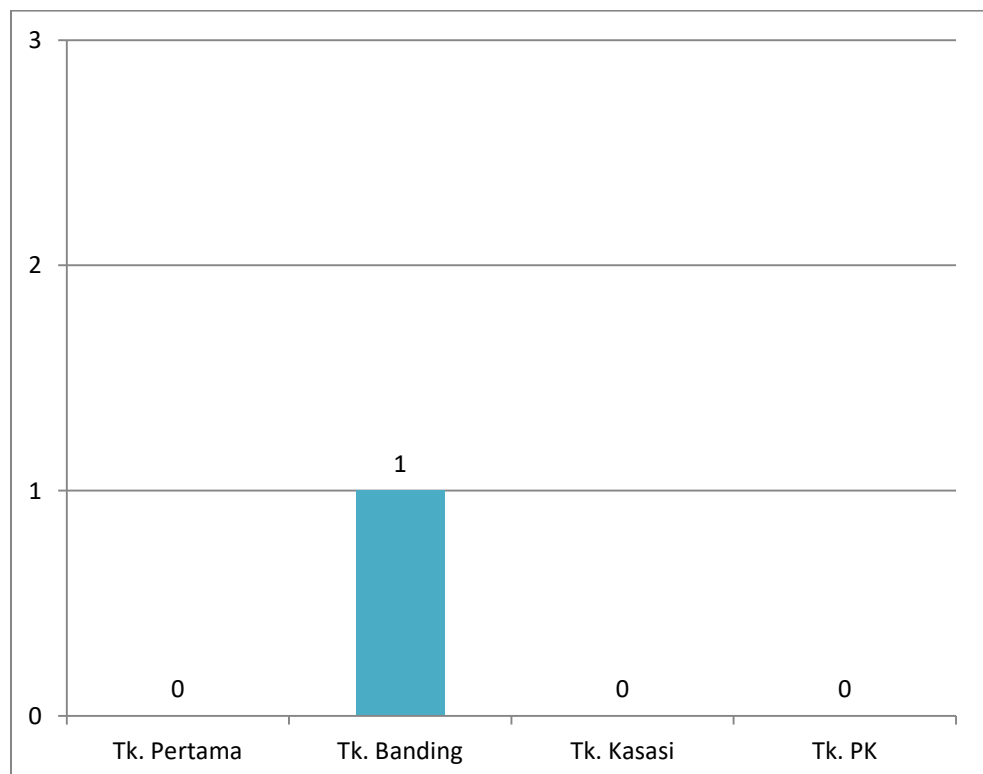
b) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Penanganan Perkara	: 26.92 %
Tunggakan Perkara	: 19 Perkara
Versi Terakhir Terpasang	: 5.1.1
Sinkronisasi terakhir	: 28 Februari 2023
Perkara 4 bulan	: - Perkara
Perkara 5 bulan	: - Perkara
Perkara 6 – 12 bulan	: - Perkara
Perkara lebih dari 12 bulan	: - Perkara
Perkara Putus Belum Minutasi	: - Perkara

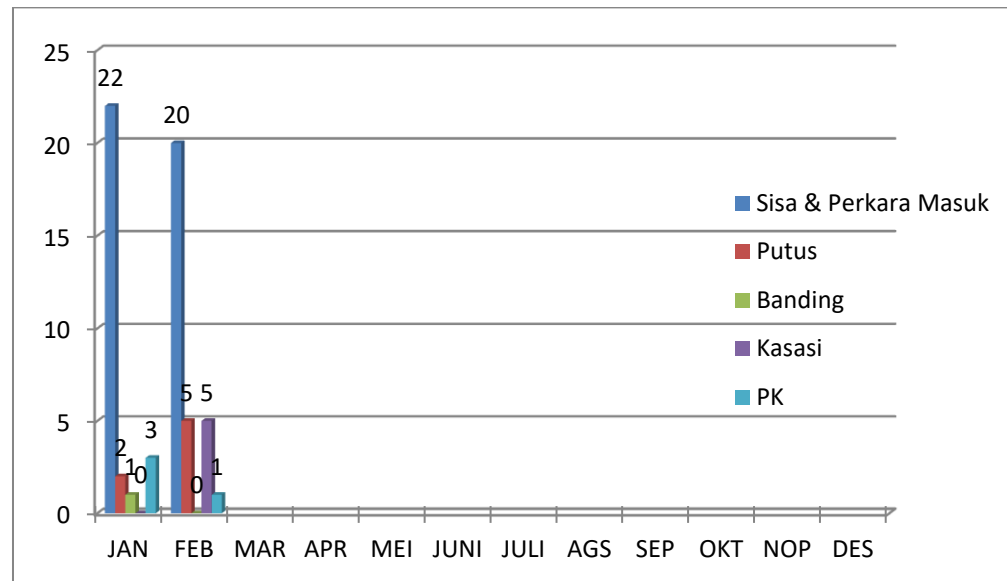
c) Monitoring Implementasi SIPP (MIS)

- Sisa Panjar Tk. Pertama belum diambil Pihak : - Perkara
- Sisa Panjar Tk. Banding belum diambil Pihak : 1 Perkara
Perkara.No. 50/G/2022/PTUN.SRG
- Sisa Panjar Kasasi belum diambil Pihak : - Perkara
- Sisa Panjar PK belum diambil Pihak : - Perkara
- E-Doc Gugatan Perbaikan yang belum diupload : - Perkara
- Belum Upload E-Doc Pemeriksaan Persiapan : - Perkara
- Belum Upload E-Doc Berita Acara Sidang : - Perkara
- Berkas perkara belum diserahkan ke Panmud Hukum: - Perkara

Statistik Sisa Panjar Yang Belum Diambil Pihak sampai dengan bulan Februari 2023



Statistik Perkara PTUN Serang s.d Bulan Februari 2023



Grafik Keadaan Perkara Per Bulan PTUN Serang s.d. Februari 2023

d) Monitoring Daftar Perkara Belum Kirim Berkas Banding Bulan Februari 2023

- Rapat kepaniteraan terkait tupoksi Panitera/Panitera Pengganti 28 Februari 2023

B. Kesekretariatan

Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dipimpin oleh Sekretaris.

Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

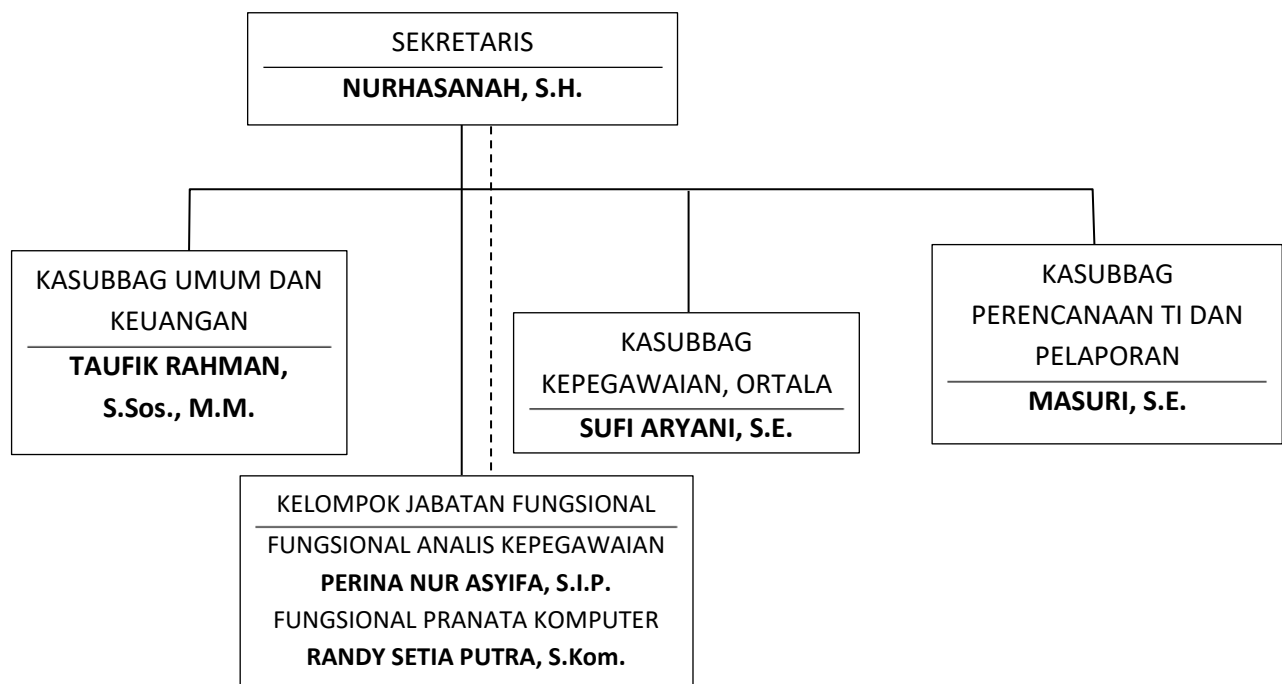
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- 2) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 3) Pelaksanaan urusan keuangan;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksanaan;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi, dan statistik;
- 6) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan;
- 7) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

1. Struktur Organisasi Kesekretariatan

Dalam menjalankan tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana, Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dibantu oleh beberapa kepala sub bagian.

Adapun struktur organisasi Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat dilihat sebagai berikut:



2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kesekretariatan

Sebagaimana tersebut pada Bab XI Bagian Ketiga Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tugas pokok dan fungsi Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A dipimpin oleh Sekretaris.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terdiri atas:

1) Sub Bagian Umum dan Keuangan

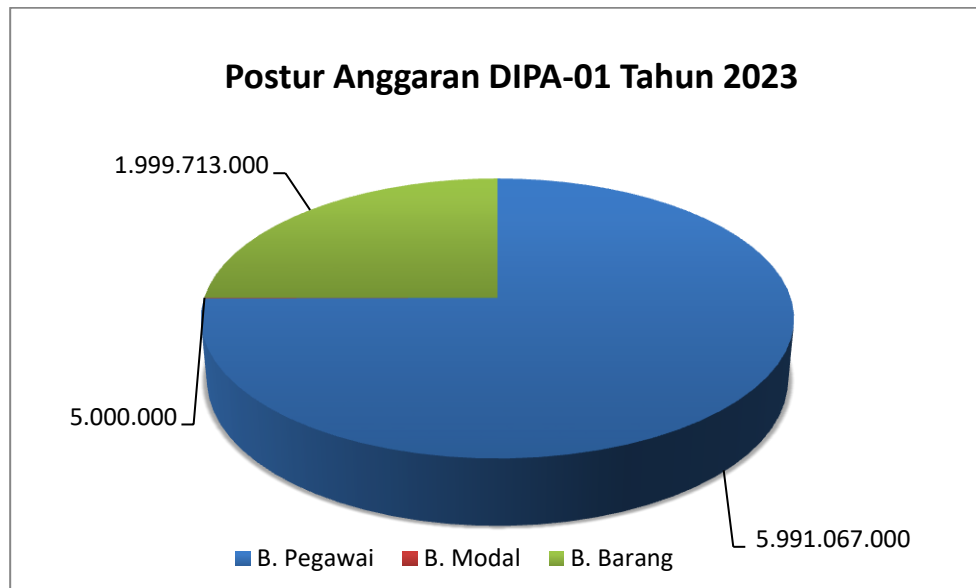
Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Untuk pelaksanaan kegiatan pada bulan Februari 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Anggaran

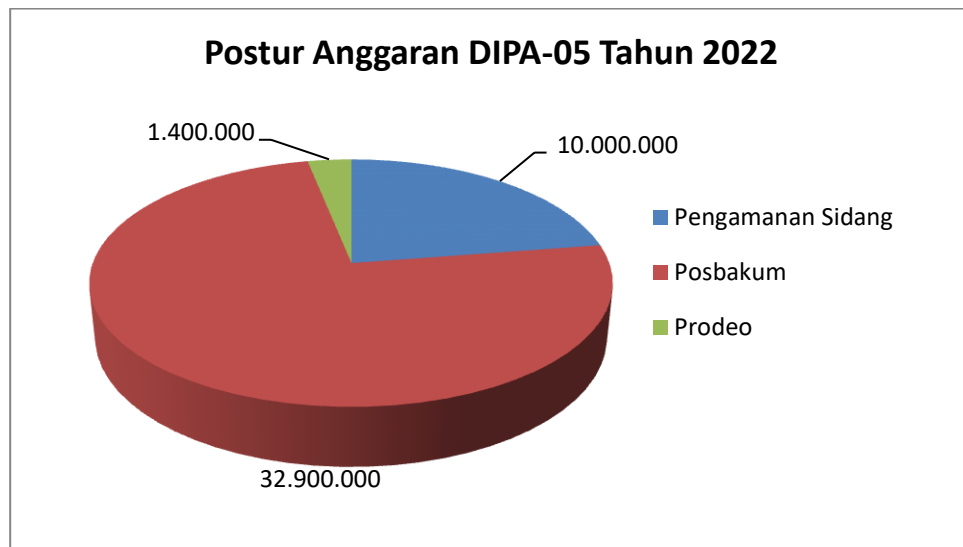
- Pagu Anggaran DIPA-01 PTUN Serang Tahun 2023 sampai dengan bulan Februari 2023.

Jenis Belanja	Pagu (Rp)
Belanja Pegawai	5,991,067,000
Belanja Barang	1,999,713,000
Belanja Modal	5,000,000
Jumlah Total	7,995,780,000



➤ Pagu Anggaran DIPA-05 PTUN Serang Tahun 2023

Klasifikasi RO	Pagu (Rp)
Pengamanan Sidang	10,000,000
Posbakum	32,900,000
Prodeo	1.400,000
Jumlah Total	44.300.000



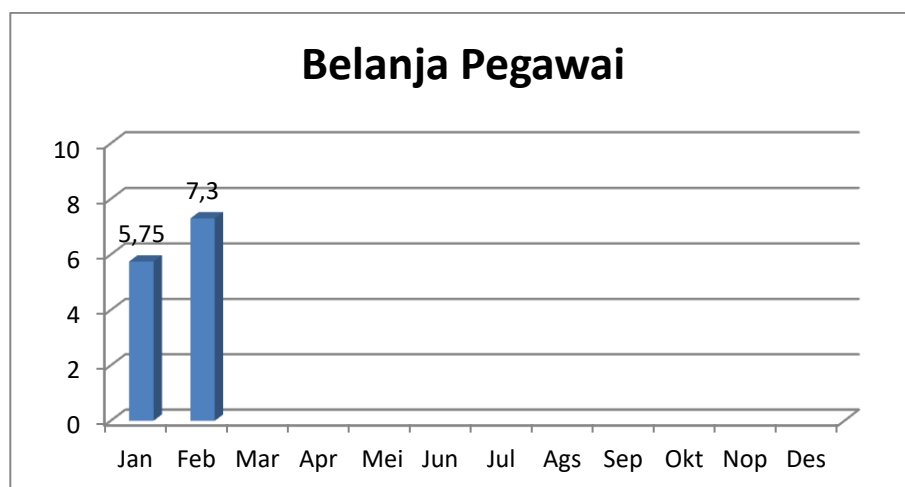
- b. Realisasi Anggaran sampai dengan bulan Februari 2023 dan progress realisasi dari bulan sebelumnya.

➤ **DIPA-01**

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	% Bulan sebelumnya	Progress
Belanja Pegawai	5,991,067,000	783.939.943	13,09%	344,219,256	7.30%
Belanja Barang	1,999,713,000	181.665.742	9,08%	17,816,000	8.20%
Belanja Modal	5,000,000	5.000.000	100%	5000,000	100%
Total Realisasi	7,995,780,000	970.605.685	12.14%	4,59%	7,55%

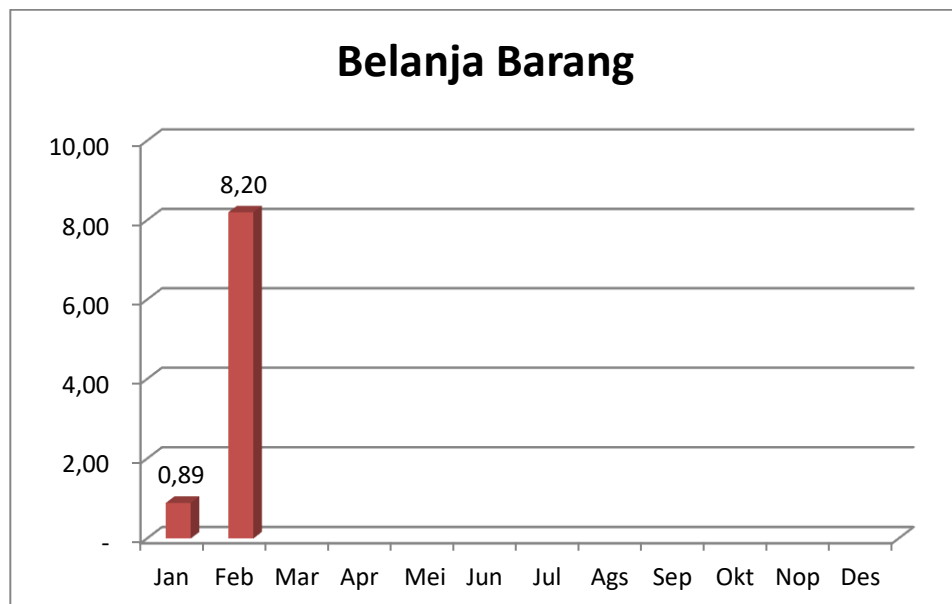
Berdasarkan tabel realisasi anggaran pada DIPA-01 diatas terlihat penyerapan anggaran dari seluruh jenis belanja sampai dengan bulan Februari 2023 mencapai 12,14% bila dibandingkan dengan realisasi bulan sebelumnya adalah sebesar 4,59% maka pada bulan Februari 2023 progress capaian realisasi anggarannya adalah sebesar 7,55%.

Statistik Penyerapan Anggaran DIPA-01



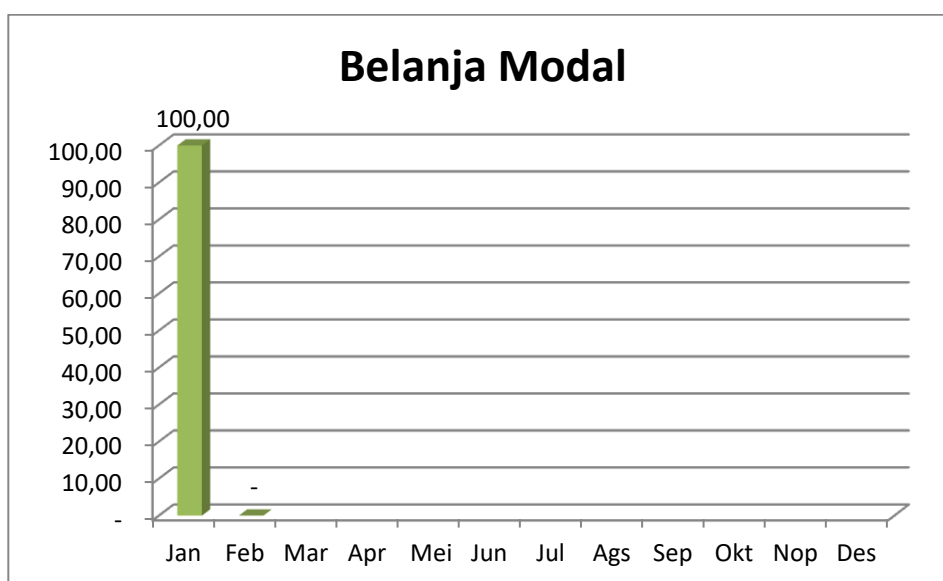
Realisasi bulan ini	:	7,30%
Realisasi s.d. bulan lalu	:	5,75%
Realisasi Kumulatif	:	13.09%

Berdasarkan grafik statistik penyerapan anggaran untuk belanja pegawai sampai dengan bulan Februari terserap sebesar 13,09% realisasi sampai dengan bulan sebelumnya adalah sebesar 5,75%, maka capaian progress belanja pegawai untuk bulan Desember adalah sebesar 5,75%.



Realisasi bulan ini	:	8.20%
Realisasi s.d. bulan lalu	:	0,89%
Realisasi Kumulatif	:	9.08%

Pada grafik realisasi anggaran belanja barang operasional dapat dilihat sampai dengan bulan Februari 2023 terserap sebesar 9,08% realisasi bulan sebelumnya adalah sebesar 0,89%, maka capaian progress belanja barang untuk bulan Desember adalah sebesar 8,20%.



Realisasi bulan ini	:	0,00%
Realisasi s.d. bulan lalu	:	100%
Realisasi Kumulatif	:	100%

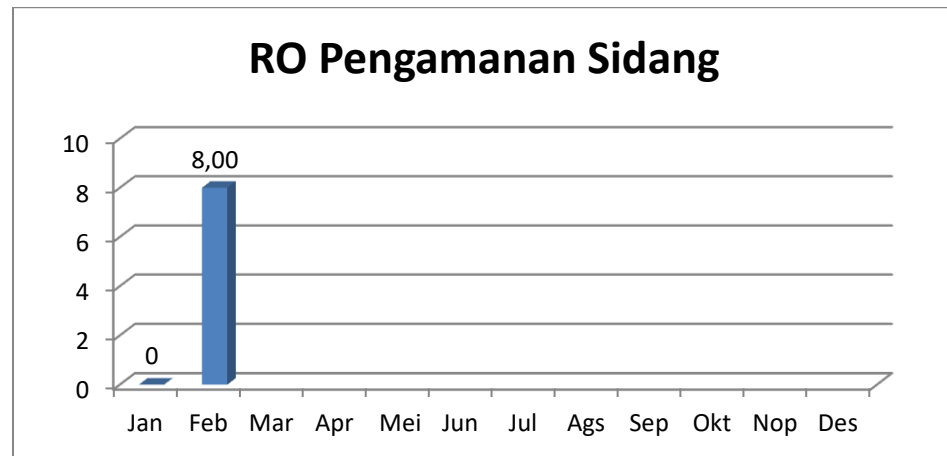
Capaian realisasi anggaran secara kumulatif pada belanja modal sampai dengan bulan Februari 2023 telah mencapai 100% pada grafik tercatat serapan anggaran pada bulan Februari 2023 adalah sebesar 100%.

➤ **DIPA-05**

Klasifikasi RO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	% Bulan sebelumnya	Progress
Pengamanan Sidang	10.000,000	800.000	8,00%	-	8,00%
Posbakum	32,900,000	2.082.000	6,33%	-	6,33%
Prodeo	1.400,000	-	-	-	-
Total Realisasi	42.300,000	2.882.000	6,51%	-	6,51%

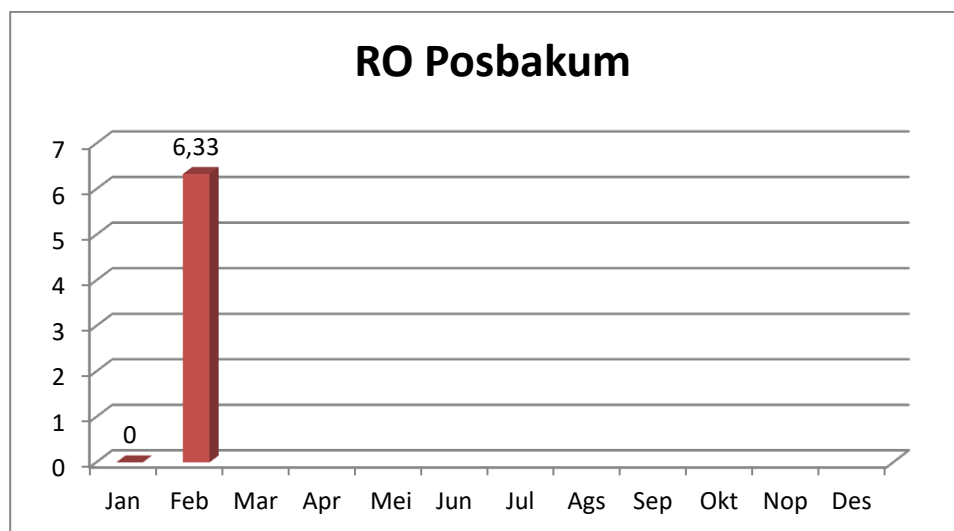
Berdasarkan tabel realisasi anggaran DIPA-05 tersebut di atas, dapat dilihat penyerapan anggaran dari seluruh RO sampai dengan bulan Februari 2023 belum ada penyerapan anggaran atau 6,51%.

Statistik Penyerapan Anggaran DIPA-05



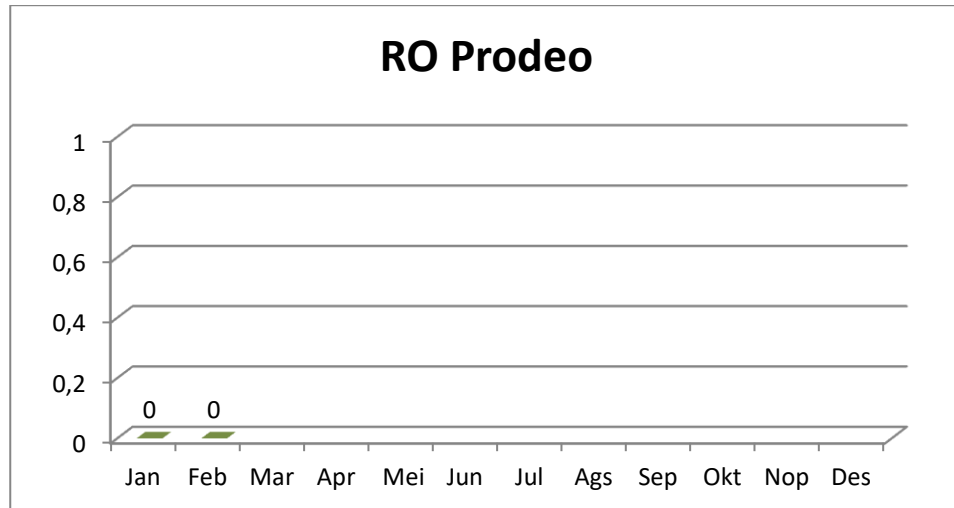
Realisasi bulan ini	: 8,00%
Realisasi s.d. bulan lalu	: 0,00%
Realisasi Kumulatif	: 8,00%

Berdasarkan grafik statistik penyerapan anggaran diatas, sampai dengan bulan Februari 2023 untuk Rincian Output (RO) Pengamanan Sidang telah realisasi sebesar 8,00%.



Realisasi bulan ini	: 6,33%
Realisasi s.d. bulan lalu	: 0,00%
Realisasi Kumulatif	: 6,33%

Untuk rincian output Pos Bantuan Hukum realisasi sampai dengan bulan Februari 2023 sebesar 6,33%.



Realisasi bulan ini	: 0%
Realisasi s.d. bulan lalu	: 0,00%
Realisasi Kumulatif	: 0,00%

Berdasarkan grafik di atas untuk Rincian Output Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) sampai dengan bulan Februari 2023 masih belum terserap oleh karena masih belum ada pencari keadilan yang memanfaatkan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo).

c. Keadaan Sarana dan Prasarana

NO	Sarpras	Luas Tanah (m2)	Bangunan (m2)	Peruntukan	Pemegang Hak Atas Tanah
1	Bangunan Gedung	4.242 m2	1.572 m2	Gedung kantor	Pemerintah RI Cq. MARI
2	Bangunan Rumah Negara		N I H I L		
3	Gedung Lainnya	64 m2	64 m2	Musholla	Pemerintah RI Cq. MARI

NO	Sarpras	Type	Jumlah	Plat Nopol	Kondisi
1	Kend Roda 2	E1F02N 12 M2 A/T	1	A 5998 Z	Baik
2	Kend Roda 2	Mega Pro III	1	A 2524 A	Baik
3	Kend Roda 4	New Avanza Veloz 1.5 M/T	1	A 1154	Baik
4	Kend Roda 4	Corolla Altis 1.8 J M/T	1	A 1583	Baik
5	Kend Roda 4	New Vios 1,5 G M/T	1	A 1706	Over Haul
6	Kend Roda 4	Kijang Innova G 2.0 M/T	1	A 1654 E	Baik

d. Monitoring Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Berdasarkan Realisasi SPM

No	Jenis Pemeliharaan	Ket
1	Pemeliharaan gedung dan bangunan	Pemeliharaan teras lobby/drop zone area
2.	Pemeliharaan peralatan dan mesin	Servis mobil dinas A 1706 dan A 1077 E

e. Monitoring Penghapusan BMN

No	Tanggal	Jenis Barang	Ket
-	-	-	-

f. Keadaan Sarana Fasilitas Gedung

No.	Nama Barang	Jumlah	Tahun Pengadaan
1	Personal Computer	44	2012 – 2022
2	Laptop	27	2012 – 2023
3	Infocus	1	2015
4	PABX	1	2014
5	AC	31	2014
6	Faximile	2	2014
7	CCTV	25	2016
8	Printer	17	2012-2023

9	Mesin Absensi	2	2014
10	Tabung Pemadam Api Ringan	1	2018
11	Genset	1	2014
12	Web Cam	1	2014
13	Monitor Informasi	7	2014 – 2019
14	Brankas	1	2012
15	Soundsystem	1	2014 Hibah Dirjen Badilmiltun
16	Mesin antrian PTSP	1	2018
17	Perangkat sidang online	1	2022
18	Mesin Antrian Sidang	1	2022
19	Access Door	3	2022
20	Lemari Peralatan Disabilitas	1	2022
21	Kursi Roda	1	2022
22	Tempat duduk prioritas Disabilitas	1	2022
23	Rambu/Tanda ruang tunggu prioritas	1	2022
24	Scanner	3	2016 – 2023

f. Monitoring Penambahan BMN bulan Februari 2023

No	Tanggal	Jenis Barang	Ket
-	-	-	-

g. Tata Persuratan

Tata cara persuratan telah dilaksanakan dan diproses sesuai dengan peraturan baik surat masuk maupun surat keluar berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 143/KMA/SK/VIII/2007 pemberlakuan Buku I Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan

Peradilan di Bawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas, dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI.

➤ Surat Masuk

Untuk periode bulan Februari 2023 surat masuk yang diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebanyak **84** dengan rincian sebagai berikut:

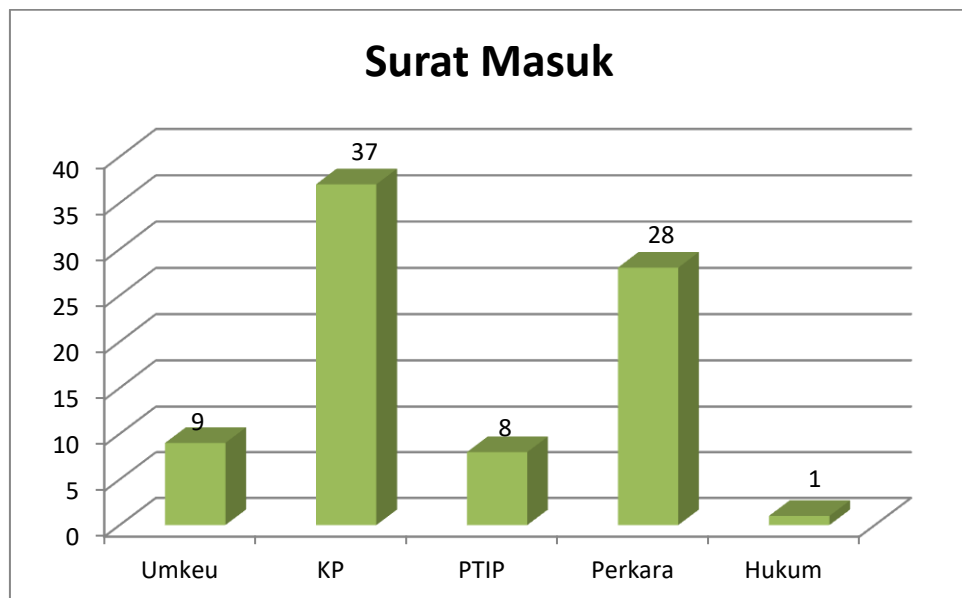
No	Sub Bagian	Asal Surat	Klasifikasi Surat			Jumlah
			Biasa	Penting	Rahasia	
1	Sub Bagian Umum dan Keuangan	MARI		V		4
		PT TUN Jakarta		V		1
		Lain-lain		V		4
		Jumlah				9
No	Sub Bagian	Asal Surat	Klasifikasi Surat			Jumlah
			Biasa	Penting	Rahasia	
2	Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	MARI		V		19
		PT TUN Jakarta		V		4
		Lain-lain		V		14
		Jumlah				37
No	Sub Bagian	Asal Surat	Klasifikasi Surat			Jumlah
			Biasa	Penting	Rahasia	
3	Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	MARI		V		4
		PT TUN Jakarta		-		-
		Lain-lain		V		4
		Jumlah				8
No	Sub Bagian	Asal Surat	Klasifikasi Surat			Jumlah
			Biasa	Penting	Rahasia	
4	Kepaniteraan Muda Perkara	MARI		V		13
		PT TUN Jakarta		-		-
		Lain-lain		V		15
		Jumlah				28
No	Sub Bagian	Asal Surat	Klasifikasi Surat			Jumlah
			Biasa	Penting	Rahasia	
5	Kepaniteraan Muda Hukum	MARI		-		-
		PT TUN Jakarta		-		-
		Lain-lain		V		1
		Jumlah				1

➤ Surat Keluar

Untuk periode bulan Februari 2023 surat keluar yang diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebanyak **182** dengan rincian sebagai berikut:

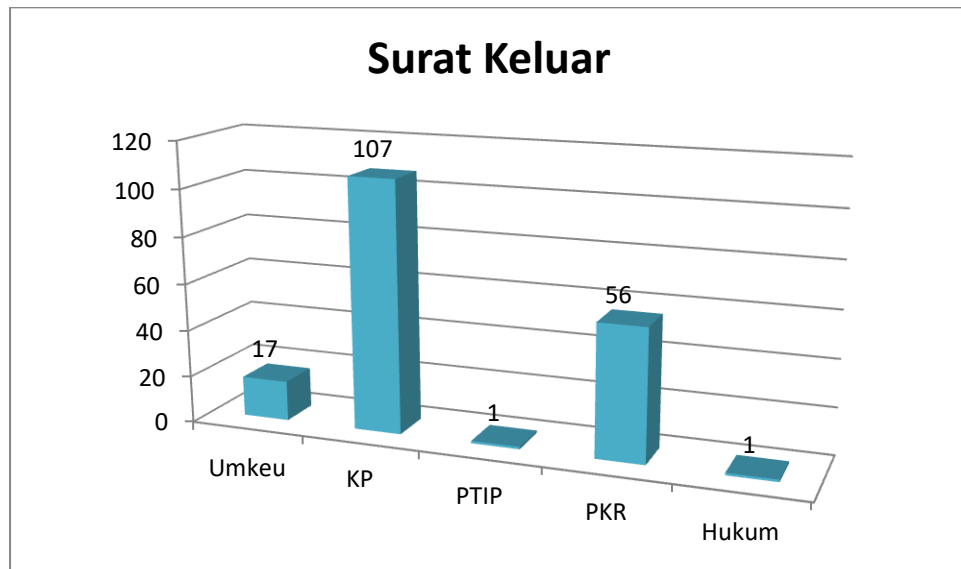
No	Sub Bagian	Klasifikasi Surat			Jumlah
		Biasa	Penting	Rahasia	
1	Subbag Umum dan Keuangan		V		17
2	Subbag Kepegawaian dan Ortala		V		107
3	Subbag PTIP		V		1
4	Kepaniteraan Muda Perkara		V		56
5	Kepaniteraan Muda Hukum		V		1
Jumlah					182

➤ Statistik surat masuk PTUN Serang bulan Februari 2023



Grafik surat masuk PTUN Serang bulan Februari 2023

➤ Statistik surat keluar PTUN Serang



Grafik surat keluar PTUN Serang bulan Februari 2023

2) Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada bulan Februari 2023 adalah:

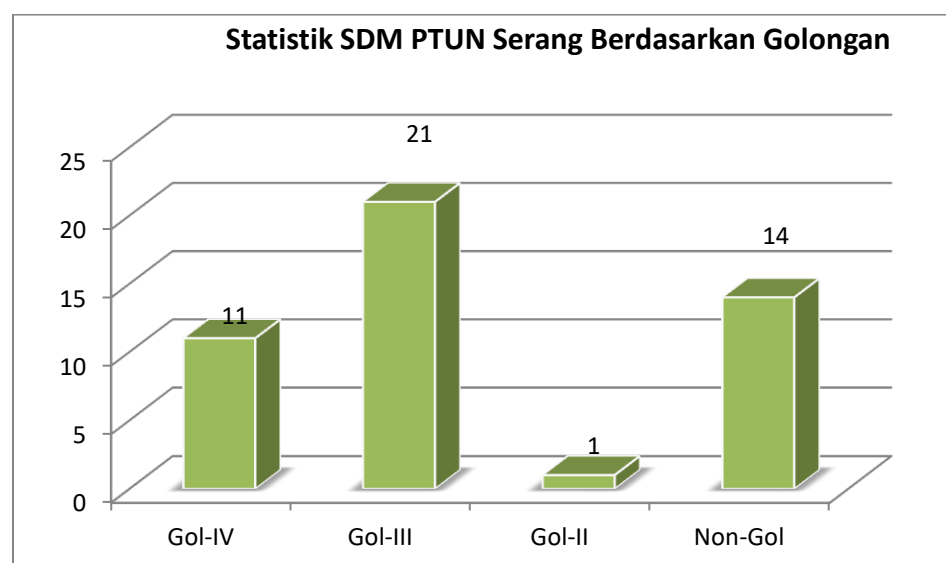
a. Komposisi SDM

✓ Golongan I	: -
✓ Golongan II	: 1 orang
✓ Golongan III	: 21 orang
✓ Golongan IV	: 11 orang
✓ Ketua	: 1 orang
✓ Wakil Ketua	: 1 orang
✓ Hakim	: 13 orang
✓ Panitera	: 1 orang
✓ Sekretaris	: 1 orang
✓ Panitera Muda	: 2 orang
✓ Panitera Pengganti	: 5 orang
✓ Juru Sita/JSP	: 1 orang

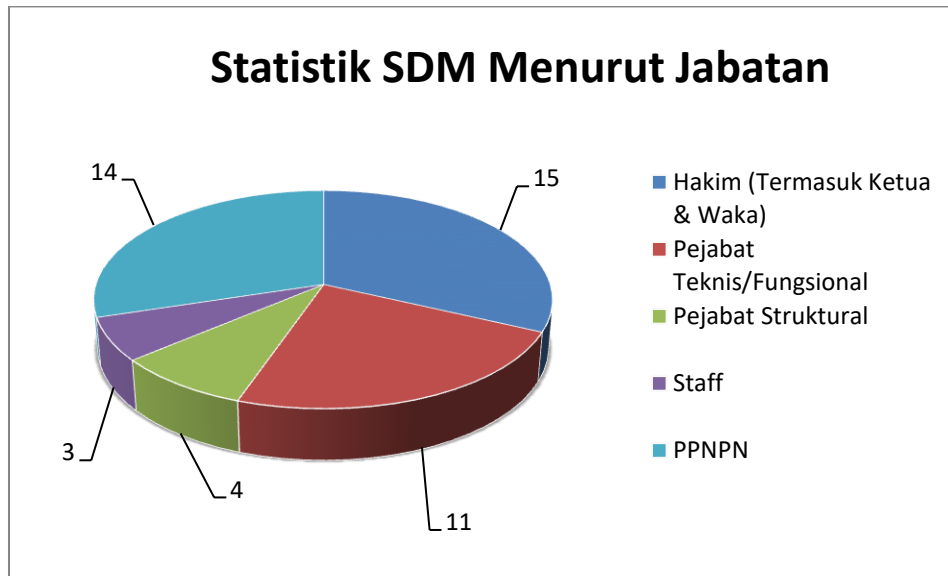
- ✓ Kepala Sub Bagian : 3 orang
 - ✓ Pejabat Fungsional : 1 orang (Analisis Kepegawaian)
1 orang (Pranata Komputer)
 - ✓ Staff : 3 orang
-
- Jumlah : 33 orang**
- ✓ PPNPN : 14 orang

NAMA UNIT	JUMLAH GOLONGAN				TINGKAT PENDIDIKAN												JML			
PTUN SERANG	I	II	III	IV	SD		SMP		SMA		DIII		S1		S2		S3		L	P
					L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
	-	1	21	11	-	-	-	-	-	-	-	2	7	8	9	6	1	-	17	16
	-		33		-		-		-		2		15		15		1		33	

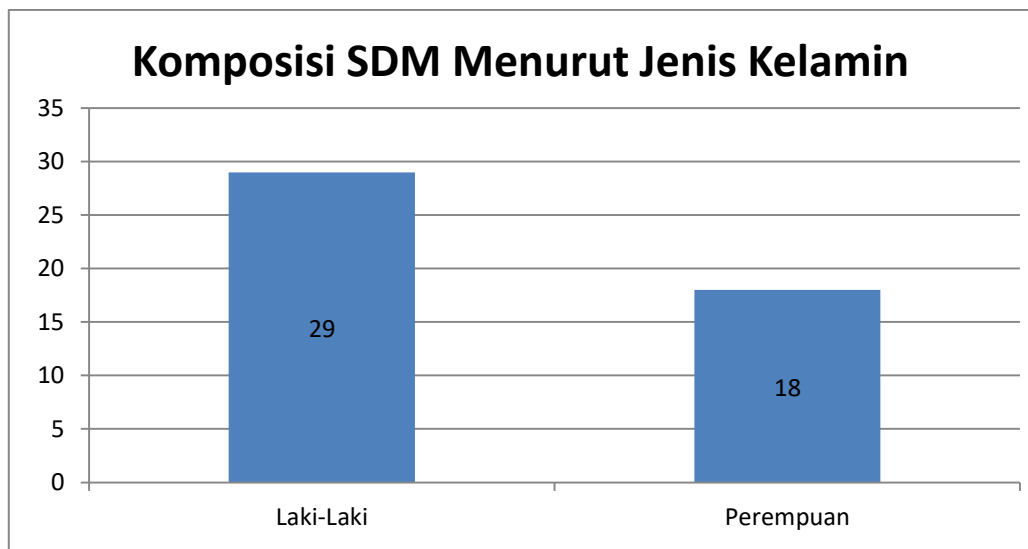
Statistik Komposisi SDM Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Menurut Golongan



Statistik Komposisi SDM Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Menurut Jabatan



Statistik Komposisi SDM Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Menurut Jenis Kelamin



b. Mutasi Pegawai

No	Jabatan	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Keterangan
-	-	-	-	-

Bulan Februari 2023 tidak ada hakim/pegawai yang mutasi baik mutasi masuk maupun mutasi keluar.

c. Promosi Pegawai

NO.	JABATAN	JUMLAH	KET.
I. HAKIM			
Nihil		Nihil	Nihil
II KEPANITERAAN			
Nihil		Nihil	Nihil
III KESEKRETARIATAN			
Nihil		Nihil	Nihil

d. Pensiun

Untuk bulan Februari 2023 tidak terdapat hakim dan/atau pegawai yang pensiun pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

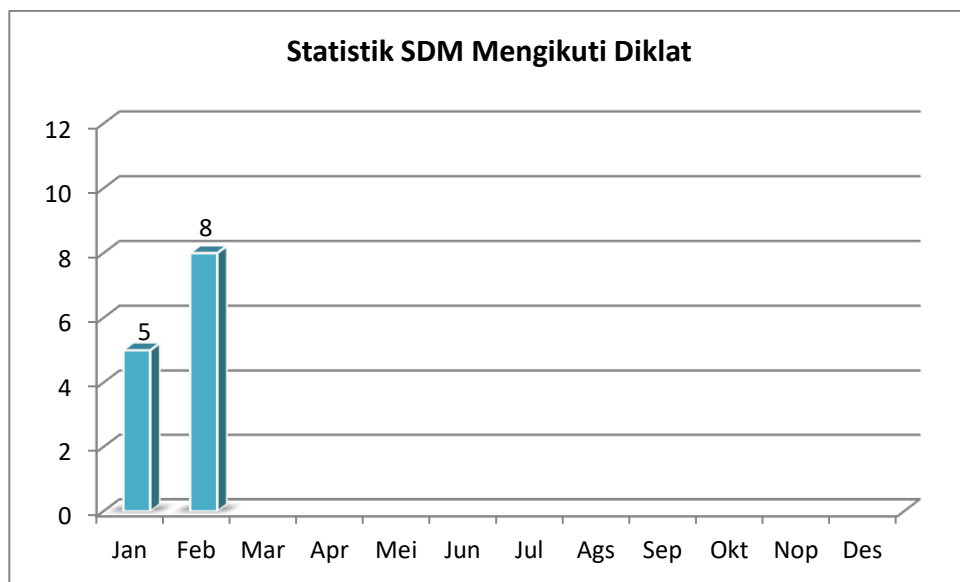
NO.	JABATAN	JUMLAH	TMT Pensiun	KET.
I. HAKIM				
Nihil		Nihil	Nihil	Nihil
II. PEGAWAI		-	-	-
Nihil		Nihil	Nihil	Nihil

e. Diklat/Bimtek SDM

No.	Mata Diklat/Bimtek	Peserta Diklat/Bimtek	Jabatan	Tgl Mulai Diklat/Bimtek	Tgl. Akhir Diklat/Bimtek
1.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Perizinan Bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia pada Pusdiklat Teknis Peradilan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Tahun 2023 secara e learning dan tatap muka.	Fatmawaty, S.H., M.H	Hakim	06 Februari 2023.	18 Februari 2023
2.	Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH: Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial yang diselenggarakan oleh Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI di Makassar	1. M. Noor Halim P. Kusuma, .H., Mh. 2. Tiar Mahardi, S.H., M.H. 3. Riki Yudiandi, S.H., M.H.	Hakim	21 Februari 2023	24 Februari 2023
3.	Workshop Optimalisasi Keterbukaan Informasi untuk Pelayanan Publik di Provinsi Banten di Cilegon	1. Dhonni Adhita Saputra, S.H. M.H. 2. Elvina R. Tampubolon, S.H., M.H.	1. Panitera 2. Panitera Pengganti	23 Februari 2023	24 Februari 2023
4.	Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Kebijakan Pasca Penetapan PMK Nomor 210/PMK.05/2022 oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Serang di Serang	Jimmy F. D. Santuri, S.H., M.H.	JSP/ Bendahara	27 Februari 2023	27 Februari 2023
5.	Bimbingan Teknis Aplikasi Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Sosialisasi	Randy S. Putra, S.Kom.	Pranata Komputer	28 Februari 2023	28 Februari 2023

PMK
232/PMK.05/2022
tentang Sistem
Akuntansi dan
Pelaporan
Keuangan Instansi
yang
diselenggarakan
oleh Kantor
Pelayanan
Perbendaharaan
Negara Serang

Statistik SDM yang mengikuti Diklat



f. Monitoring Kenaikan Pangkat/KGB

Monitoring kenaikan pangkat golongan maupun kenaikan gaji berkala untuk periode bulan Februari 2023.

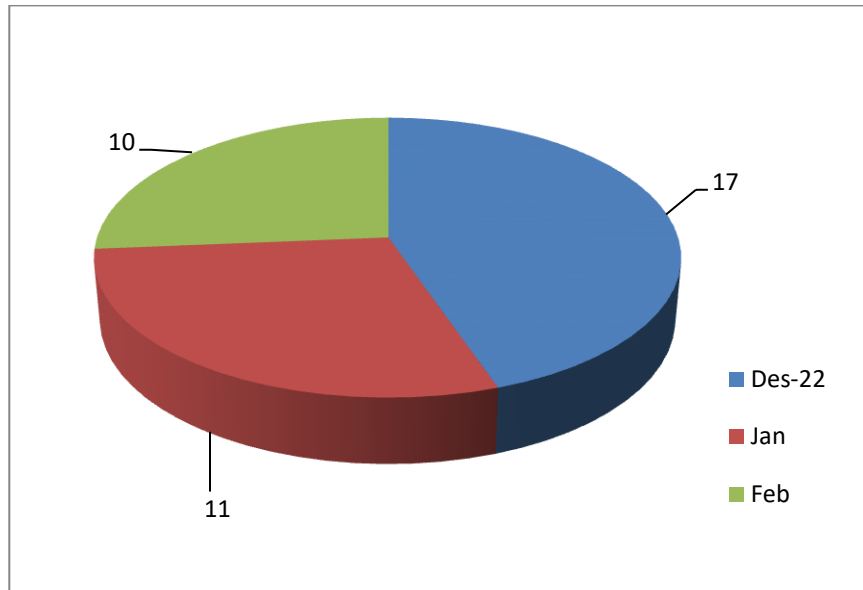
NO.	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Ali Anwar, S.H., M.H.	Hakim	Kenaikan Pangkat
2.	M. Noor Halim P. Kusuma, S.H., M.H.	Hakim	Kenaikan Pangkat
3	Tiar Mahardi, S.H., M.H.	Hakim	Kenaikan Pangkat

4.	Dr. Umar Dani, S.H., M.H.	Hakim	KGB
5.	Haristov Aszadha, S.H.	Hakim	KGB

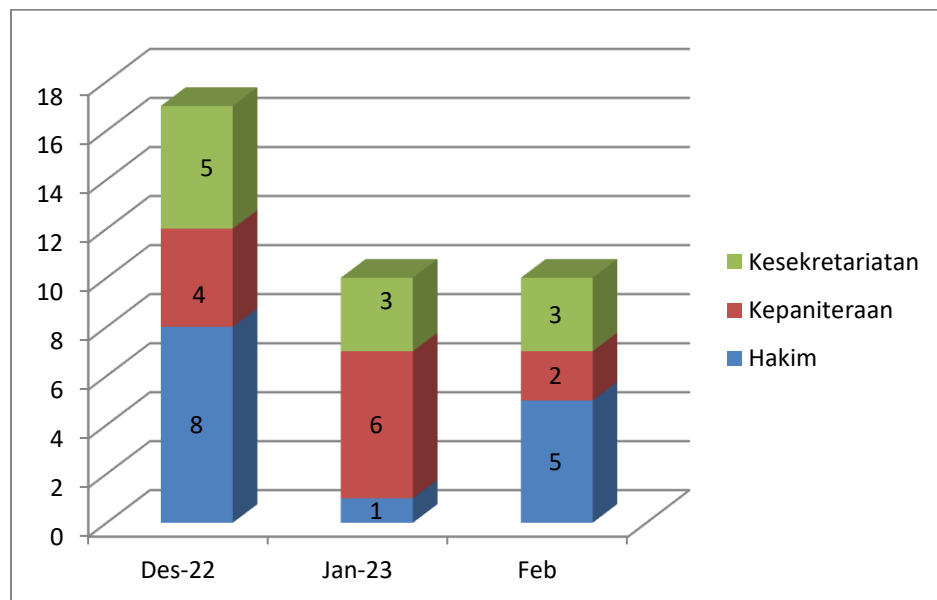
g. Monitoring Cuti

No	Nama	Jabatan	Lama Cuti	Mulai Cuti	Akhir Cuti	Jenis Cuti
1	2	3	4	5	6	7
1	Jimmy Fernando D. Sianturi	JSP/ Bendahara	1	1-2-2023	1-2-2023	Cuti Tahunan
2	M. Herry Indrawan	Hakim	1	2-2-2022	2-2-2022	Cuti Tahunan
3	Ai Anwar	Hakim	2	6-2-2022	28-2-2022	Cuti Tahunan
4	Nurhasanah	Sekretaris	2	13-2-2023	14-2-2023	Cuti Tahunan
5	Juliah Saragih	Hakim	1	13-2-2022	13-2-2023	Cuti tahunan
6	Taufik Rahman	Kasubbag Umku	7	13-2-2023 16-02-2023	15-2-2023 24-2-2023	Cuti Tahunan dan Cuti Alasan Penting
7	Hambali	Panitera Pengganti	9	13-2-2023	23-2-2023	Cuti Tahunan
8	Perina Nur Assyifa	Analisis Kepegawaian	2	13-2-2023	14-2-2023	Cuti Tahunan
9	Febrina Permadi	Hakim	1	16-2-2023	16-2-2023	Cuti Tahunan
10	M. Noor Halim P. Kusuma	Hakim	1	20-2-2023	20-2-2023	Cuti Tahunan

h. Statistik Cuti Tiga Bulan Terakhir



i. Statistik jumlah hakim, kepaniteraan dan kesekretariatan yang mengambil cuti 3 bulan terakhir



Kegiatan Rutin Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala bulan Februari 2023:

- ❖ Membuat dan menyiapkan Daftar hadir dan Daftar pulang harian bulan Februari 2023;
- ❖ Rekapitulasi Absensi Manual dan Presensi online bulan Februari 2023 yang dilaporkan pada bulan Februari 2023 telah dilaksanakan dan dikirimkan ke BUA MA, BAWAS MA, Dirjen Badimiltun, Biro Kepegawaian MA, dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN;
- ❖ Melaksanakan rapat Beperjakat untuk usulan Juru Sita Peggant a.n. Sdri. Fitri Indriati Nofita, A.Md.Kom.;
- ❖ Melaksanakan pembuatan SK Pimpinan untuk Rotasi penempatan dan penugasan pegawai a.n. Dian Kuspriyatno, SH. Dari bagian PTIP ke bagian Panmud Hukum, SK Penunjukkan penanggungjawab dan peningkatan kompetensi Hakim, Instruksi Ketua tentang Penunjukkan penerimaan tamu perkara, Instruksi Ketua tentang petunjuk pelaksanaan SMAP dalam proses penerimaan perkara, SK Penetapan budaya kerja 5R dan Tim pemeriksa penerapan 5R pada PTUN Serang;
- ❖ Membuat laporan rekapitulasi Bukti lapor SPT Tahunan Pajak orang pribadi tahun 2022 dan sudah dikirimkan ke KPP Serang Barat melalui Pos;
- ❖ LHKPN Tahun 2022 Hakim dan Pegawai yang merupakan wajib lapor telah membuat laporannya dan telah di update di sikep masing-masing, namun belum semua mendapatkan tanda terima dari KPK sehingga bagi yang belum mempunyai tanda terima maka yang diunggah adalah bukti lapornya;
- ❖ Telah melakukan pengusulan CPNS menjadi PNS dan sudah terdaftar di aplikasi SIKEP a.n. Ovi Hanifah, SH. dan Shafira Amalia Zahara, SH.
- ❖ Melakukan pengusulan piagam penghargaan untuk 6 orang Hakim dan Pegawai dan telah terdaftar pada aplikasi SIKEP sebagai berikut:

- Hambali, SH., MH. dan Elvina Rentalya Tampubolon, SH., MH. untuk Satya Lencana Karya Satya X tahun;
- Satya X tahun - Darmawiyadi, SH. untuk Karya Satya Lencana Karya Satya XXX Tahun;
- Ali Anwar, SH., MH., M. Noor Halim P. Kusuma, SH., MH. Dan Tiar Mahardi, SH.,MH. untuk Satya Karya Dwiwindu.

3) Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi Dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas:

- Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran
- Pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

a. Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran.

Untuk bulan Februari 2023 pelaksanaan kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran ialah sebagai berikut:

- Melaksanakan Monitoring Pelaksanaan Anggaran bulan Februari 2023 untuk capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada DIPA-01 sebagai berikut:

1) Kualitas Perencanaan Anggaran

- Nilai Revisi DIPA : 10,00 *bobot* 10
- Nilai Deviasi Hal. III DIPA : 6,40 *bobot* 10

2) Kualitas Pelaksanaan Anggaran

- Nilai Penyerapan Anggaran : 12,95 *bobot* 20
- Nilai Belanja Kontraktual : 0,00 *bobot* 0
- Nilai Penyelesaian Tagihan : 0,00 *bobot* 0
- Pengelolaan UP dan TUP : 10,00 *bobot* 10
- Dispensasi SPM : 5,00 *bobot* 5

3) Capaian Output : -

Nilai Total:
63,52
Konversi Bobot:
80%
Nilai Akhir:
79,40

- Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Februari tahun 2023 DIPA-05

1) Kualitas Perencanaan Anggaran

- Nilai Revisi DIPA : 10,00 *bobot* 10
- Nilai Deviasi Hal. III DIPA : 4,65 *bobot* 10

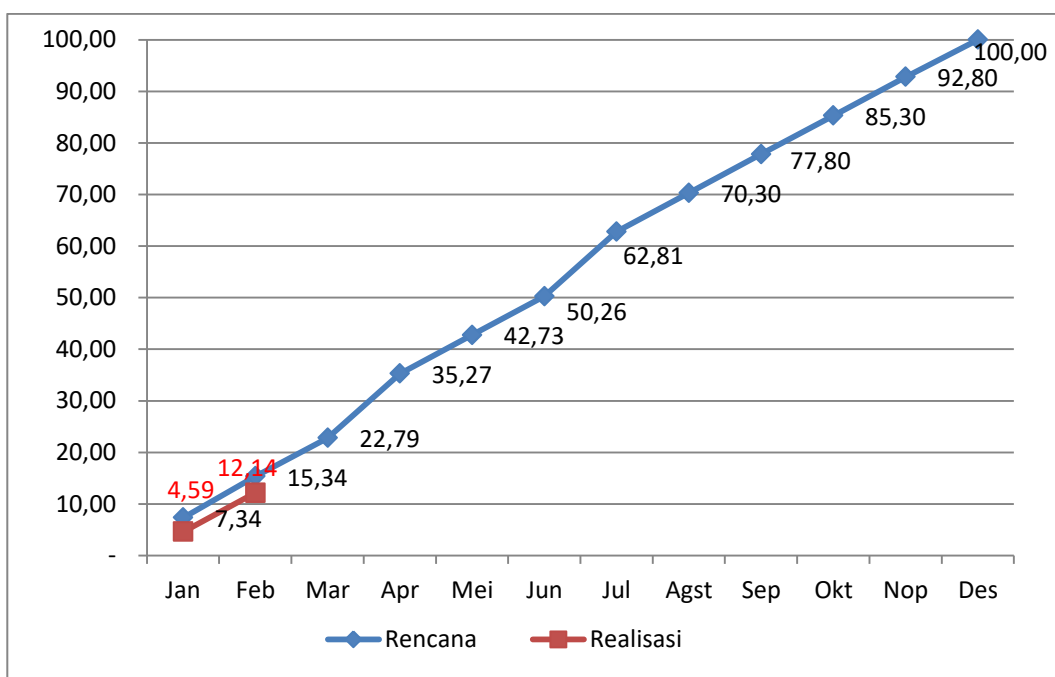
2) Kualitas Pelaksanaan Anggaran

- Nilai Penyerapan Anggaran : 8,67 *bobot* 20
- Nilai Belanja Kontraktual : 0,00 *bobot* 0
- Nilai Penyelesaian Tagihan : 0,00 *bobot* 0
- Pengelolaan UP dan TUP : 10,00 *bobot* 10
- Dispensasi SPM : 5,00 *bobot* 5

3) Capaian Output : -

Nilai Total:
57,49
Konversi Bobot:
80%
Nilai Akhir:
71,86

Statistik Konsistensi Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA-01 Terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) sampai dengan bulan Februari 2023.



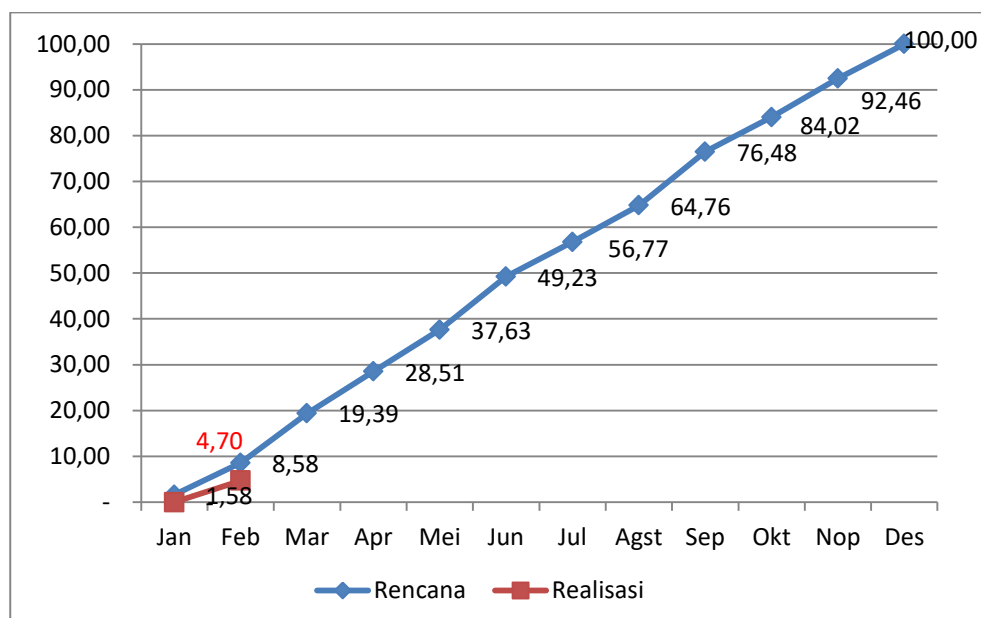
Rencana RPD Awal : 15,34%

Realisasi s.d bulan ini : 12,14%

Deviasi : -3,20%

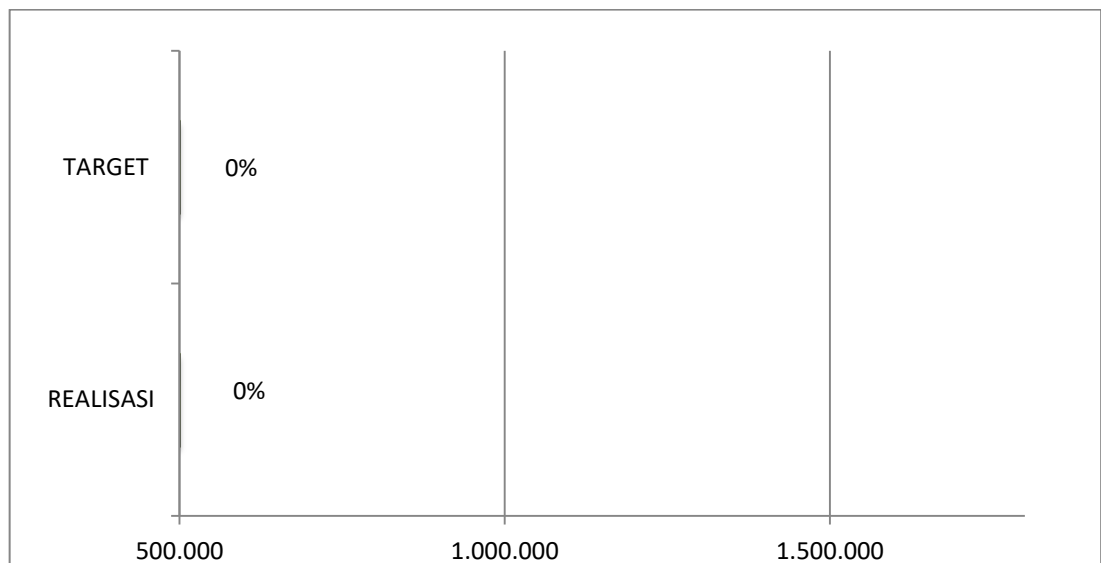
Berdasarkan statistik konsistensi realisasi penyerapan anggaran tersebut di atas pada Rencana Penarikan Dana pada awal tahun anggaran/bulan Februari 2023 capaian realisasi anggaran sebesar 12,14% dari Rencana Penarikan Dana (RPD) yang direncanakan yakni pada 15,34% maka terdapat deviasi minus sebesar -3,20%.

Statistik Konsistensi Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA-05 Terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) sampai dengan bulan Februari 2023



Rencana RPD Awal	:	8,58 %
Realisasi s.d bulan ini	:	0,00 %
Deviasi	:	-3,88 %

Berdasarkan statistik konsistensi realisasi penyerapan anggaran tersebut di atas bulan Februari 2023 DIPA-05 realisasi anggaran yang dicapai sebesar 4,70% pada Rencana Penarikan Dana (RPD) direncanakan sebesar 8,58%, maka terdapat deviasi minus sebesar -- 3,88%.

Realisasi PNBP Sampai dengan bulan Februari 2023 DIPA-01

Target	:	0,00%
Realisasi	:	0,00%
Deviasi	:	0,00%

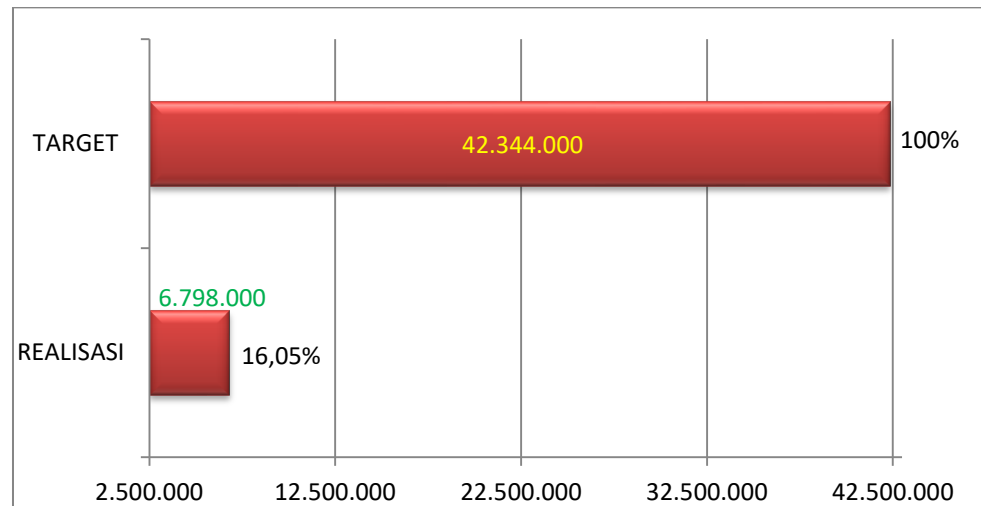
Tahun anggaran 2023 tidak ada target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk DIPA-01 yang berasal dari PNBP Umum, oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak memiliki sarana dan prasarana yang dapat menghasilkan PNBP rutin setiap tahunnya seperti rumah dinas dan lainnya, namun Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berupaya agar tetap ada PNBP yang diterima melalui penghapusan BMN yang telah dijadwalkan dapat direalisasikan tahun 2023.

Realisasi PNBP DIPA-05 Sampai dengan bulan Februari 2023

Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk tahun anggaran 2023 pada DIPA-05 adalah sebesar 42.344.000,- diasumsikan dari capaian realisasi PNBP tahun 2023 yang berasal dari:

- ✓ Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan ditargetkan Rp970.000,-

- ✓ Pendapatan Ongkos Perkara Ditargetkan Rp8.370.000,-
- ✓ Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya Ditargetkan Rp33.004.000,-



Target	:	100,00 %
Realisasi	:	16,05 %
Deviasi	:	-83,95 %

Berdasarkan grafik di atas progres realisasi PNPB fungsional Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dari target TA 2023 sampai dengan bulan Februari 2023 mencapai 16,05%.

b. Pengelolaan Keadaan Teknologi Informasi, dan Pendukungnya

Kegiatan rutin yang dilaksanakan dalam pengelolaan keadaan teknologi informasi dan pendukungnya untuk bulan Februari 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	Teknologi Informasi	Jumlah	Tanggal Monitoring	Kondisi
1	Internet Speed	100 mbps	28-02-2023	Baik
2	Server	3 unit	28-02-2023	Baik
3	Wireless Access Point	19 unit	28-02-2023	Proses upgrade dengan area jangkauan lebih luas

4	Printer	16 unit	28-02-2023	Baik
5	Router	1 unit	28-02-2023	Baik
6	PC	31 unit	28-02-2023	Berfungsi
7	Laptop	23 unit	28-02-2023	1 unit rusak berat (proses penghapusan)
8	Scanner	2 unit	28-02-2023	Berfungsi
9	Switch Hub	2 unit	28-02-2023	Baik
10	Layar Informasi	10 unit	28-02-2023	Baik
11	Mesin informasi	1 unit	28-02-2023	Baik
12	CCTV	25 unit	28-02-2023	Aktif
13	Mesin Antrian Sidang	1 unit	28-02-2023	Baik
14	Infocus	1 unit	28-02-2023	Rusak berat
15	Sound System	2 unit	28-02-2023	Berfungsi
16	Kamera Web Cam	1 unit	28-02-2023	Baik
17	Perangkat Sidang Online	1 Perangkat	28-02-2023	Berfungsi baik
18	Apikasi SIJAWARA	1 sistem	28-02-2023	Terimplementasi baik
19	Aplikasi Antrian Sidang	1 sistem	28-02-2023	Terimplementasi baik
20	Aplikasi Jadwal Sidang (e-attendance)	1 sistem	28-02-2023	Terimplementasi baik
21	Aplikasi SIMKARA	1 sistem	28-02-2023	Terimplementasi baik
22	Aplikasi SUARA	1 sistem	28-02-2023	Terimplementasi baik
23	Aplikasi SIMISTI	1 sistem	28-02-2023	Terimplementasi baik
24	Aplikasi SIDAPAT	1 sistem	28-02-2023	Terimplementasi baik
25	Aplikasi SIMARJAN	1 sistem	28-02-2023	Terimplementasi Baik

Aplikasi Eksternal (Mahkamah Agung)				
23	Aplikasi SIPP	1 sistem	28-02-2023	Terimplementasi baik
24	Aplikasi e-Court	1 sistem	28-02-2023	Terimplementasi baik
25	Aplikasi Siwas	1 sistem	28-02-2023	Terimplemenasi baik
26	Aplikasi Sikep	1 sistem	28-02-2023	Terimplementasi baik
27	Aplikasi Komdanas	1 sistem	28-02-2023	Terimplementasi baik

- Bulan Februari 2023 merapikan kabel instalasi PC dan mengganti (*reform*) bracket PC pada ruang sidang online.

c. Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi serta pelaporan

No.	Kegiatan	Tanggal Monitoring	Keterangan
1	Input Data RKA K/L Manual/Aplikasi Sakti dan TOR/ Revisi DIPA	31-02-2023	RKA-K/L Pagu Indikatif TA 2024
2	Laporan Realisasi Anggaran	31-02-2023	Telah dilaksanakan
3	SAKIP	31-02-2023	SAKIP 2022 telah dilaporkan
4	Laporan Kegiatan Tahunan	31-02-2023	TA 2022 Sudah dilaporkan
5	Pengisian LRA Manual Komdanas PTUN Serang	31-02-2023	Masih menunggu update aplikasi komdanas
6	Monitoring e-Monev PP39 2006 Bappenas	31-02-2023	Masih menunggu update aplikasi e-Monev
7.	Pengisian Capaian Output	31-02-2023	s.d. bulan Februari telah diisi
8	Pengecekan Printer	31-02-2023	Telah dilaksanakan
9	Pengecekan Perlengkapan Server	31-02-2023	Kondisi baik
10	Pengecekan Perangkat Laptop dan PC	31-02-2023	Kondisi baik
11	Pembaharuan Konten Website	31-02-2023	Dilaksanakan secara berkala

12	Troubleshooting Printer, Laptop, PC, perlengkapan server dan jaringan internet.	31-02-2023	Telah dilaksanakan
13	Update SIPP Lokal dan SIPP Web	31-02-2023	Dilaksanakan sebanyak 2 kali setiap hari kerja
14	Sinkronisasi Data SIPP Lokal dengan MA RI	31-02-2023	Dilaksanakan 2 kali setiap hari kerja
15	Maintenance Traffic Jaringan Internet	31-02-2023	Proses rekonfigurasi WAP
16	Melaksanakan e-Rekonsiliasi LK dengan BUN dan Korwil	31-02-2023	Telah dilaksanakan
17	Backup Data dan Informasi	31-02-2023	Telah dilaksanakan

- Mengupdate SIPP
- Pembaharuan data informasi di Website dan Media Sosial

d. Pengelolaan Website dan Media Sosial Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Kegiatan pengelolaan website dan sosial media Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berusaha dilaksanakan secara disiplin disamping pemutakhiran pelaporan reguler pada bulan Februari 2023 juga ada beberapa konten yang diunggah dan didokumentasikan baik berita/pengumuman maupun kegiatan antara lain:

1. Mengikuti secara daring pengantar purnabaki Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.



2. Pimpinan PTUN Serang melaksanakan konsultasi ke Biro Perencanaan dan Biro Keuangan Mahkamah Agung RI terkait APBN-Perubahan tahun 2023.



3. Penandatanganan Komitmen Bersama Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Tahun 2023.



4. Rapat koordinasi Tim Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan agenda sosialisasi rencana kerja dan tugas tim serta tindak lanjut rekomendasi evaluasi SMAP.



5. Senam kesegaran jasmani bersama Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.



6. Sosialisasi melalui siaran radio 102.8 Serang Gawe FM tentang Peran dan Fungsi serta Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang oleh Hakim M. Noor Halim Perdana Kusuma, S.H., M.H.



7. Menerima kunjungan Tim BPJS Kesehatan Wilayah Serang untuk sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.



8. Memperingati Isra' Mi'raj 27 Rajab 1444 H.



9. Morning spirit besar Senin 20 Februari 2023 disampaikan oleh Hakim Dr. Umar Dani, S.H., M.H.



10. Rapat koordinasi Tim Pembangun Integritas Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.



11. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengikuti Bimtek Penyusunan Naskah Kebijakan, Naskah Akademik dan Naskah Urgensi Tahun 2023.



12. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengikuti Bimtek Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH: Studi Kasus Laporan Masyarakat.



13. Menerima kunjungan dan diskusi dari Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI



14. Menerima kunjungan studi banding penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dari Pengadilan Negeri Bogor.



15. Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Mengikuti rapat koordinasi dalam rangka reviu Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) untuk sewa rumah dinas dan transportasi hakim dan hakim adhoc.



16. Panitera dan Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengikuti Workshop Optimalisasi Keterbukaan Informasi untuk Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten.



BAB III

P E N U T U P

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi pada seluruh unit kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah dijalankan sebagaimana mestinya, hal tersebut bisa terlaksana oleh karena kerja sama yang telah dibangun dan terjalin baik dari Kepaniteraan maupun Kesekretariatan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan operasional tugas dan fungsi dapat diselesaikan melalui koordinasi dan komunikasi secara baik antara unit kerja baik kepaniteraan maupun kesekretariatan maka sebagai *supporting unit* kepaniteraan dan kesekretariatan senantiasa terus berusaha meningkatkan pelayanan demi terpenuhinya *core business* Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

=---LAMPIRAN---=

**FOTO DOKUMENTASI
RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI BULAN FEBRUARI 2023
BIDANG KEPANITERAAN
SELASA, 28 FEBRUARI 2023**



**FOTO DOKUMENTASI
RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI BULAN FEBRUARI 2023
BIDANG KESEKRETARIATAN
KAMIS, 2 MARET 2023**

